



# Yogya Anggarkan Rp 2,79 M Perbaiki Sembilan Talud

Akibat Siklon Cempaka, ada 10 titik talud sungai yang rusak.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana sekitar Rp 2,79 miliar untuk memperbaiki sembilan titik talud sungai yang mengalami kerusakan akibat dampak Siklon Cempaka akhir November 2017.

"Akibat Siklon Cempaka, ada 10 titik talud sungai yang rusak. Namun, satu titik di Sungai Gajah Wong langsung diperbaiki warga dibantu Gembara Loka Zoo. Kami tinggal melakukan perbaikan di sembilan titik lainnya," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Aki Lukman di Yogyakarta, Senin (15/1).

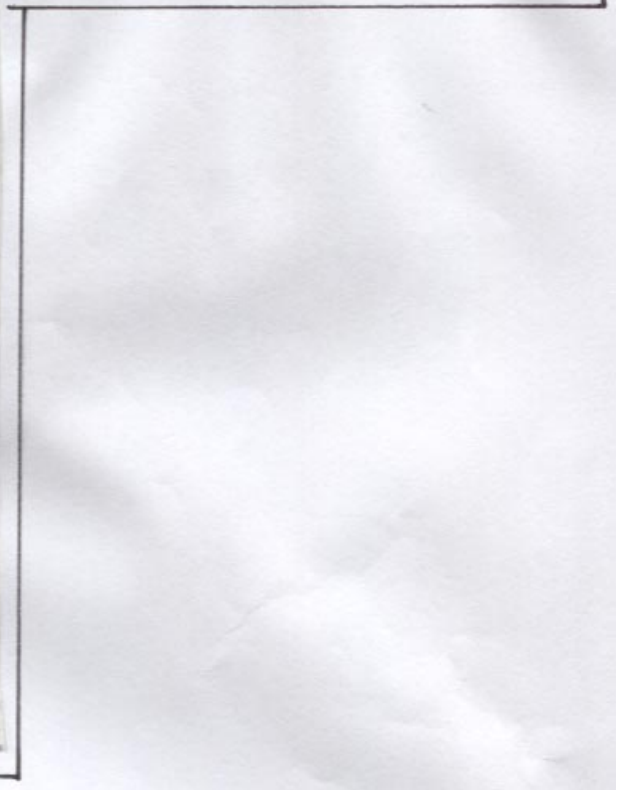
Menurut Aki, sebanyak enam dari sembilan titik talud yang rusak berada di Sungai Winongo, dan sisanya tersebar di Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Tekik. Keenam titik talud rusak di Sungai Winongo berada di RT 36 Tegalorejo, RT 47 Badran, RT 48 Badran, RT 39 Kricak, RT 35 Kricak, dan di SD Bangunrejo.

Sedangkan tiga titik lainnya berada di RT 50 Pandeyan yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong, RT 56 Sorosutan di Sungai Code dan RT 35 Umbulharjo di Sungai Tekik. "Untuk proses perbaikan ini, kami terpaksa menggeser anggaran perbaikan talud Sungai Code di Jalan Jazuli sebesar Rp 1,8 miliar ditambah dana perbaikan talud Sungai Code di wilayah Gondomanan sebesar Rp400 juta," kata Aki.

Alokasi anggaran terbesar akan digunakan untuk memperbaiki talud sungai yang berada di belakang SD Bangunrejo yaitu mencapai Rp 1,5 miliar. "Kondisi talud sungai di lokasi tersebut memang sudah rusak dan bisa membahayakan bangunan sehingga perlu segera diperbaiki," katanya.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan melelangkan pekerjaan tersebut setelah menyusun detail engineering design (DED). "Harapannya, proses lelang berjalan lancar. Kami khawatir terjadi gagal lelang karena pekerjaan perbaikan cukup sulit," katanya.

Selain itu, terdapat dua pekerjaan lain yang juga harus diawali dengan proses lelang yaitu perbaikan talud di RT 36 Tegalorejo, dan RT 48 Badran. Kedua pekerjaan tersebut ma-



sing-masing membutuhkan dana Rp 300 juta.

"Sisanya, akan dilakukan dengan penunjukan langsung karena biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak terlalu besar. Tetapi, semuanya juga harus diawali dengan proses perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Aki sudah mencoba berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Serayu-Opak untuk perbaikan talud yang rusak akibat siklon Cempaka. "Namun, sampai saat ini tidak ada kepastian. Oleh karena itu, kami berupaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan dana APBD kota," katanya.

Pada tahun anggaran 2018, Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kota Yogyakarta juga menganggarkan dana insidental yang cukup besar untuk perbaikan talud sungai yaitu mencapai Rp 1,8 miliar. Sedangkan untuk drainase Rp 600 juta dan Rp 560 juta untuk perairan.

#### **Warga terdampak longsor Jlagran**

Sementara itu, sebanyak empat kepala keluarga yang terdampak longsor di Jlagran Yogyakarta untuk sementara diungsikan ke Rusunawa Gemawang hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.

"Penempatan warga terdampak

longsor di Jlagran dilakukan setelah warga setuju dipindahkan sementara. Pemerintah Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan Pemerintah DIY untuk penempatan warga terdampak," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Agus Winarto.

Lokasi longsor di Jlagran berada di bantaran Sungai Winongo. Lokasi tersebut longsor saat Kota Yogyakarta diguyur hujan lebat sebagai dampak Siklon Cempaka akhir November 2017. Menurut dia, selain keempat keluarga warga Jlagran, masih tercatat delapan kepala keluarga warga Juminahan yang juga menjadi korban terdampak longsor bantaran Sungai Code akibat Siklon Cempaka.

Namun, lanjut Agus, warga enggan ditempatkan di Rusunawa Gemawang dan lebih memilih tinggal di rumah saudara mereka. "Kami sudah tawarkan agar warga menempati Rusunawa Gemawang, tetapi tidak mau," katanya.

Selama tinggal di Rusunawa Gemawang, warga tidak dipungut biaya apapun. Bahkan, jika warga bersedia tinggal selamanya di rumah susun tersebut bisa difasilitasi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY. ■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005